UNDANGAN PENGAJUAN PROPOSAL

Penguatan Aksi Iklim dan Mata Pencaharian Berbasis Perdesaan (Proklim) di Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia

**CFP reference number:** ID/TEM/23295/2024/001

**CFP document issue date:** **Dec 13, 2024**

# INFORMASI KHUSUS

## Tujuan proyek UNOPS

**Tantangan perubahan iklim di Indonesia**

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Hutan, tata guna lahan (FOLU) dan energi merupakan sektor ekonomi strategis bagi Indonesia. Namun, sektor-sektor tersebut juga merupakan sumber utama emisi GRK dan telah ditargetkan sebagai sektor utama untuk memenuhi target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) berdasarkan Perjanjian Paris [[1]](#footnote-0). Dalam jangka panjang, Indonesia berencana untuk secara signifikan mengurangi emisinya di keduanya, melalui tindakan transformasional yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan energi, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati dan penggundulan hutan, penggunaan air tawar, nitrogen dan fosfor, serta persaingan penggunaan lahan. Tindakan-tindakan ini sangat dibutuhkan mengingat pergeseran tata guna lahan di masa lalu, yang selama bertahun-tahun telah menimbulkan konsekuensi ekologis dan sosial, karena hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan, dan 50-60 juta penduduk Indonesia bergantung langsung pada hutan untuk mata pencaharian mereka.

Menyadari pentingnya bentang alam tropis dan masyarakat di dalamnya bagi kepentingan nasional dan internasional, Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah keputusan yang menggembirakan; Pemerintah telah secara sukarela berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41% pada tahun 2030 [[2]](#footnote-1)dan mengembangkan strategi pemanfaatan lahan dan emisi kehutanan, melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan sebagai berikut: perlindungan kelestarian fungsi lingkungan hidup; pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan hidup global. Undang-Undang ini merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem dan melindungi lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam Pasal 70 Undang-Undang ini ditegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang ini ditetapkan karena penebangan hutan, degradasi lahan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan telah memberikan tekanan pada ekosistem negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Seperti yang ditunjukkan oleh temuan utama Laporan Penilaian ke- 6 Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB (IPCC), setiap peristiwa yang mengancam jiwa dan kesehatan termasuk kekeringan, kebakaran, dan banjir semakin saling memengaruhi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Akibatnya, krisis iklim secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap terganggunya ekonomi nasional dan subnasional, terutama di bidang kehidupan dasar termasuk makanan, air, energi, dan kesehatan. Peristiwa ini memengaruhi masyarakat lokal yang rentan di seluruh desa di negara ini.

Selain itu, berdasarkan Pasal 3.4 Buku Pegangan UNFCCC, Indonesia telah mengintegrasikan kebijakan terkait mitigasi dan adaptasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah (RPJMN/D 2020-2024). Implementasi yang efektif dari rencana pembangunan ini memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan Strategi Jangka Panjang Pemerintah Indonesia untuk Ketahanan Iklim dan Rendah Karbon 2050 (LTS-LCCR) [[3]](#footnote-2), yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK melalui peningkatan ketahanan dalam empat kebutuhan dasar (pangan, air, energi, dan kesehatan lingkungan), dengan tiga area target ketahanan (ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ekosistem dan lanskap).

Salah satu target NDC 2030 sektoral yang lebih tinggi di Indonesia adalah sektor Kehutanan dan Pemanfaatan Lahan Lainnya (FOLU). Sektor FOLU - yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - memantau dengan saksama kondisi yang ada, dan bekerja keras pada berbagai langkah adaptasi dan mitigasi yang sangat dibutuhkan untuk menghindari bencana dan mendukung masyarakat lokal yang rentan terdampak di daerah pedesaan.

**PROKLIM – Program Desa Iklim**

Program Kampung *Iklim* (PROKLIM) telah digagas oleh KLHK sejak awal tahun 2012. Sejak tahun 2016, PROKLIM telah menjadi program strategis dan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. PROKLIM merupakan salah satu program prioritas KLHK untuk menanggulangi dampak perubahan iklim di tingkat tapak. Sesuai dengan namanya, PROKLIM bertujuan untuk memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa. PROKLIM mendorong terwujudnya mata pencaharian yang netral karbon, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim, dan pada gilirannya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dalam rangka intensifikasi pertanian (adopsi teknologi) dan ekstensifikasi untuk pembangunan pertanian rendah karbon yang memerlukan dukungan modal ( LTS-LCCR 2050 ).

Program ini juga mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan dampak perubahan iklim serta pengurangan emisi GRK. Ini termasuk kolaborasi dan kemitraan berbagai pemangku kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, bisnis lokal, LSM, perusahaan swasta, akademisi, dan lembaga keuangan.

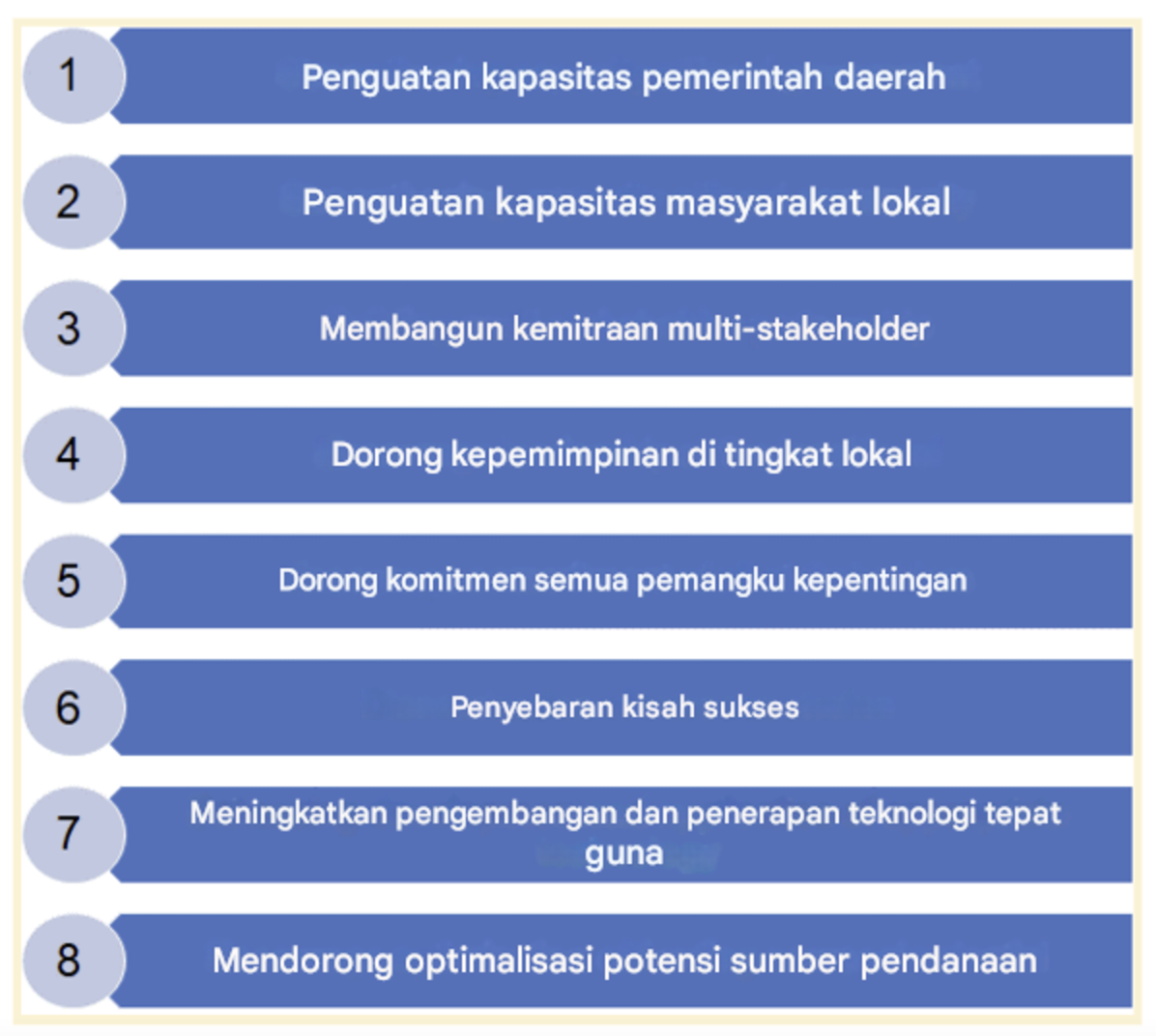
Oleh karena itu, PROKLIM telah menjadi program strategis andalan KLHK mengingat dampak keseluruhannya dalam mendorong masyarakat setempat untuk melakukan tindakan adaptasi dan mitigasi, serta mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca di permukaan tanah sekaligus meningkatkan penghidupan masyarakat dan rumah tangga. Oleh karena itu, PROKLIM difokuskan pada penguatan kegiatan lokal sesuai dengan kondisi dan budaya setempat.

Implementasi PROKLIM memberikan manfaat dan dampak lokal. Manfaat nyata adalah peningkatan jumlah fasilitas/infrastruktur yang dapat mendukung upaya peningkatan ketahanan perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK (misalnya biopori, sumur resapan, penampungan air hujan, peralatan pengelolaan limbah, instalasi produksi biogas, dan tanaman tahunan). Di antara manfaat tidak nyata yang diantisipasi adalah peningkatan literasi tentang perubahan iklim di masyarakat sasaran, peningkatan kerja sama dan kekompakan masyarakat, dan akses terbuka bagi pihak eksternal yang berpotensi berminat untuk mendukung pengembangan kegiatan mata pencaharian lebih lanjut. Secara keseluruhan, dampak PROKLIM telah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui tindakan iklim kolaboratif dan kolektif.

Mengingat bahwa krisis iklim paling berat ditanggung di tingkat desa dan dusun yang terisolasi dan lebih rentan, proposal ini menjadikan PROKLIM sebagai dasar kerjanya, sembari membangun inisiatif baru untuk mata pencaharian yang lebih berbasis bisnis daripada pertimbangan akar rumput yang biasa diberikan untuk meningkatkan mata pencaharian. Dalam pelaksanaannya, proposal ini sepenuhnya mendukung dan mendukung maksud KLHK untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan penting lainnya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

**Pendekatan dan Strategi PROKLIM**

Implementasi PROKLIM, yang didorong oleh upaya lokal di bawah inisiatif KLHK, berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui delapan strategi PROKLIM, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.



**PROKLIM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB**

Keberhasilan proyek PROKLIM ini akan diukur dari potensi transformasional dari 100 desa yang menjadi target untuk mempromosikan mata pencaharian rendah karbon yang berkelanjutan dan tangguh terhadap kekeringan, banjir, dan gelombang panas berkala. Proyek ini juga membuka jalan bagi KLHK untuk mengidentifikasi praktik terbaik guna memperluas program PROKLIM secara nasional dan memasukkan tindakan ke dalam kebijakan untuk mendukung Indonesia dalam memenuhi target NDC-nya. Proyek PROKLIM secara langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs [[4]](#footnote-3)) PBB berikut ini:

* SDG 13: Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

Hal ini juga memfasilitasi pencapaian beberapa SDGs lainnya, sebagai berikut:

* SDG 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun;
* SDG 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan;
* SDG 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
* SDG 8: Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak untuk semua;
* SDG 10: Mengurangi Ketimpangan dalam dan antar negara;
* SDG 12: Memastikan pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan;
* SDG 15: Melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, serta menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
* SDG 17: Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

## Latar Belakang dan Tujuan Proyek UNOPS PROKLIM

**PROKLIM UNOPS di Sumatera Selatan**

Proyek ini dilaksanakan oleh Kantor Layanan Proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOPS). Pemangku kepentingan utamanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Yayasan Temasek (donor UNOPS), dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) sebagai mitra teknis.

PROKLIM menyasar masyarakat setempat di Provinsi Sumatera Selatan yang penduduknya terpapar dan rentan terhadap risiko iklim, dan di mana terdapat sedikit atau tidak ada lembaga berbasis masyarakat, ataupun kegiatan yang menargetkan adaptasi dan mitigasi iklim, dan di mana pengembangan mata pencaharian tetap tidak ada atau tidak berdaya.

Provinsi Sumatera Selatan pertama kali bergabung dengan program PROKLIM nasional pada tahun 2013, dengan total 180 desa iklim PROKLIM yang terdaftar pada tahun 2021. Inisiatif PROKLIM secara keseluruhan dari KLHK dipimpin oleh Gubernur dan beberapa kepala daerah, bekerja sama dengan masyarakat setempat, perusahaan swasta, dan lembaga keuangan. Selain itu, telah terbentuk 93 kemitraan antara perusahaan swasta dan lembaga keuangan sebagai hasil dari kegiatan PROKLIM yang sedang berlangsung di seluruh provinsi.

Tujuan Strategis keseluruhan dari proyek PROKLIM didefinisikan di bawah ini. Hibah yang ditandatangani sebagai bagian dari Panggilan Proposal ini harus memastikan bahwa hasilnya berkontribusi pada tujuan strategis ini.

1. Tujuan Strategis (SO) 1: Membangun 100 desa iklim baru yang terdaftar;
2. Tujuan Strategis (SO) 2: Memperkuat keterlibatan masyarakat melalui mata pencaharian berkelanjutan yang berbasis bisnis dan diberdayakan oleh teknologi digital;
3. Tujuan Strategis (SO) 3: Meningkatkan sinergi antara pemerintah di berbagai tingkatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan keberlanjutan desa iklim.

Berbagai entitas dan lembaga pemerintah Indonesia (tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan desa) dan pendukung utama (LSM, universitas, akademisi, perusahaan swasta) akan terlibat dalam konteks pengelolaan pembentukan dan pengembangan upaya yang diusulkan ini. Hasil awal akan difokuskan pada pembentukan PROKLIM baru dan peningkatan mata pencaharian rumah tangga. Namun, keterlibatan dengan para pemangku kepentingan akan berlangsung secara konsisten di semua fase proyek, untuk memastikan bahwa sinergi dikembangkan dan dipertahankan sejak awal. Proyek PROKLIM akan difokuskan pada pendalaman dan formalisasi sinergi ini untuk memperkuat kolaborasi jangka panjang di antara para pemangku kepentingan utama.

Prakarsa ini diharapkan dapat memberikan perbaikan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta meningkatkan ketahanan perubahan iklim melalui kolaborasi efektif dan kemitraan multipihak.

## 1.3. Dampak yang Diharapkan

Dampak yang ditargetkan dari proyek PROKLIM difokuskan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dan ketahanan di masyarakat yang terkena dampak iklim melalui bidang-bidang utama berikut:

1. Desa/Lokasi Iklim yang Sudah Ada

Berhasil mendaftarkan dan mengoperasionalkan 100 Desa/Lokasi Iklim yang berfungsi sebagai model kehidupan berkelanjutan, yang memamerkan strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif.

1. Peningkatan Literasi Iklim

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perubahan iklim di kalangan anggota masyarakat, memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan proaktif dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

1. Penguatan Mata Pencaharian

Meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat lokal dengan mendiversifikasi sumber pendapatan, meningkatkan akses ke pasar, dan menyediakan pelatihan tentang praktik berkelanjutan.

1. Pengurangan Praktik yang Tidak Berkelanjutan

Mengurangi praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan pengelolaan lahan.

1. Peningkatan Ketahanan Masyarakat

Memupuk ketahanan masyarakat terhadap dampak iklim melalui inisiasi kegiatan adaptasi dan mitigasi, yang mengarah pada pengurangan kerentanan.

1. Kolaborasi dan Sinergi

Memperkuat kemitraan di antara pemangku kepentingan lokal dan nasional, memastikan pendekatan terkoordinasi terhadap aksi iklim dan berbagi praktik terbaik untuk keberlanjutan.

Dengan mencapai dampak yang ditargetkan ini, proyek PROKLIM bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat untuk menavigasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim secara efektif.

Kegiatan yang menjadi sasaran pendanaan ini harus sesuai dengan tujuan program PROKLIM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No. P4/PPI/API/PPI.0/3/2023 yang telah diperbarui, sebagaimana disebutkan secara khusus dalam Lampiran I Bab II: Sasaran, Target, dan Manfaat ProKlim. Sasaran, target, dan manfaat PROKLIM adalah:

Tujuan Khusus PROKLIM

1. Mendorong kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat akar rumput.
2. Memberikan pengakuan atas tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat akar rumput yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat.
3. Memberikan pengakuan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan PROKLIM
4. Memberikan pengakuan kepada para pendukung untuk memperlancar terbentuknya dan berkembangnya PROKLIM
5. Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan di lokasi tertentu untuk diterapkan di wilayah lain sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Proyek PROKLIM bertujuan untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan di masyarakat yang menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui inisiatif yang terarah, proyek ini berupaya mencapai hasil yang jelas dan terukur yang sejalan dengan tujuan nasional dan SDG. Sasaran ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan.

Proyek ini dirancang untuk memberdayakan penduduk setempat, mendorong pengelolaan lingkungan, dan mendukung peralihan menuju pembangunan rendah emisi dan tangguh terhadap iklim. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi, Proyek PROKLIM akan meningkatkan mata pencaharian lokal dan berkontribusi pada tujuan iklim yang lebih luas. Hasil spesifik yang diharapkan dan manfaat yang akan dicapai:

Keluaran yang diharapkan tercapai melalui pelaksanaan proyek PROKLIM

1. Mengembangkan praktik bagi masyarakat di desa terpilih terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penerapan kegiatan berbasis masyarakat yang aplikatif, adaptif, dan berkelanjutan.
2. Memastikan bahwa penerima manfaat memiliki rasa kepemilikan atas proyek PROKLIM melalui pengembangan kapasitas sangat penting untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif. Dengan menumbuhkan rasa kepemilikan, masyarakat cenderung lebih terlibat aktif dalam praktik berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan dan mata pencaharian mereka.
3. Menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan bagi pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan kerja sama semua pihak di tingkat nasional dan daerah untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
5. Mengembangkan kegiatan adaptasi dan mitigasi iklim yang menghasilkan manfaat ekologi, ekonomi, dan pengurangan risiko bencana.
6. Membangun kemitraan yang kuat antara berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat lokal untuk meningkatkan efektivitas aksi iklim.

Manfaat PROKLIM Termasuk

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak terkait iklim.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3. Ketersediaan data mengenai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal
4. Meningkatkan kesadaran dan menerapkan gaya hidup berdampak rendah dengan pengurangan emisi GRK.
5. Meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk mengadopsi teknologi adaptif terhadap perubahan iklim dan mencapai emisi GRK yang rendah.

Melalui upaya yang terarah ini, Proyek PROKLIM ditetapkan untuk menciptakan dampak yang signifikan, memberdayakan masyarakat untuk bertanggung jawab atas ketahanan dan keberlanjutan iklim mereka sambil berkontribusi terhadap tujuan iklim nasional dan global.

## 1.4. Cakupan dan gambaran umum pendanaan hibah berdasarkan Panggilan Proposal ini

**1.4.1 Kategori Hibah yang Tersedia**

Penerima hibah diharapkan memberikan kontribusi terhadap dampak-dampak tertentu yang sejalan dengan tujuan proyek. Dampak-dampak ini akan diukur menggunakan indikator-indikator target yang telah ditetapkan, yang menyediakan cara untuk menilai kemajuan dan keberhasilan. Hasil-hasil yang ingin dicapai oleh penerima hibah akan ditentukan oleh dua jenis hibah yang tersedia di bawah proyek PROKLIM. Setiap kategori hibah memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, yang akan memandu pemilihan hasil-hasil dan indikator-indikator. Jenis-jenis hibah diuraikan di bawah ini:

1. **Kategori 1: Dana Hibah Literasi Iklim dan Pemberdayaan Masyarakat**

Jenis hibah pertama berfokus pada peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim di masyarakat. Hibah ini mendukung organisasi yang mendidik penduduk desa tentang dampak iklim dan praktik berkelanjutan. Dengan mendanai kegiatan penjangkauan dan pengembangan kapasitas, organisasi ini membantu penduduk setempat terlibat dalam pembangunan mereka.

Penerima hibah juga didorong untuk menggunakan inovasi sosial, seperti model koperasi, untuk meningkatkan penghidupan desa iklim, meningkatkan akses ke keuangan dan pasar, serta meningkatkan keragaman aliran pendapatan (misalnya, tanaman pangan, ternak, agroforestri, perikanan). Secara keseluruhan, hibah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim dan membangun masa depan yang berkelanjutan.

| **No** | **Keluaran** | **Indikator Target** | **Hasil** | **Hasil akhir** | **Garis Waktu**  **(untuk mencapai)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Desa/Lokasi Iklim PROKLIM Baru Didirikan | 90 Desa/Lokasi Iklim sasaran terdaftar di 10 kabupaten | 1. Kegiatan adaptasi, mitigasi, dan mata pencaharian dimulai. *(lihat bagian 1.6)* 2. Catatan/data menunjukkan peningkatan keyakinan dalam membangun dan meningkatkan penghidupan desa iklim dan aktivitas terkait. | 1. 90 Desa/Lokasi Sasaran (di 10 Kabupaten) telah terdaftar sebagai Desa/Lokasi PROKLIM di Sistem Registrasi Nasional (SRN) 2. Setidaknya 85% (minimal 85 Desa/Lokasi) PROKLIM baru yang dibentuk telah memulai kegiatan adaptasi, mitigasi, dan penghidupan. 3. Data Desa/Lokasi mencatat penurunan praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan | Maret 2025  April 2025  Februari 2026 |
| 2. | 2.1. Mata Pencaharian Desa/Lokasi Iklim diperkuat | Peningkatan mata pencaharian lokal di 100 Desa/Lokasi sasaran Iklim | Pendirian desa iklim yang efektif memberikan manfaat bagi penghidupan masyarakat lokal melalui peningkatan kesejahteraan rumah tangga. | 1. Minimal 85 Desa/Lokasi yang telah mapan akan menjalani pelatihan pendahuluan yang dirancang untuk meningkatkan akses ke keuangan dan pasar, serta mendiversifikasi sumber pendapatan melalui tanaman pangan, ternak, agroforestri, dan akuakultur. Pelatihan ini juga akan melibatkan penilaian kebutuhan masyarakat dan pengadaan barang yang disesuaikan dengan persyaratan khusus tersebut. 2. Catatan menunjukkan sedikitnya 40% penerima manfaat proyek ini dialokasikan untuk bisnis milik perempuan, serta kelompok terpinggirkan dan pemuda. | Februari 2026  Juni 2026 |
| 3. | 3.1. Peningkatan sinergi multipihak di tingkat nasional dan daerah | Sinergi multi-stakeholder di tingkat nasional dan lokal | Manajemen aksi iklim yang efektif di semua tingkatan | Catatan menunjukkan peningkatan partisipasi dari pemerintah nasional dan daerah, serta pendukung utama PROKLIM, yang telah meningkatkan keberlanjutan PROKLIM. Selain itu, praktik terbaik telah dicatat untuk peningkatan di masa mendatang.[[5]](#footnote-4) | Juni 2026 |
| 4. | 4.1 Keterlibatan sektor swasta | Surat Pernyataan Minat dari mitra sektor swasta | Membangun ekosistem berkelanjutan tempat bisnis menyediakan sumber daya dan ide, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. | Minimal 3 surat pernyataan minat dari organisasi sektor swasta yang berkomitmen untuk berkolaborasi pada inisiatif komunitas. | Maret 2025 |
| Kegiatannya meliputi hal berikut:   1. **Mengembangkan Laporan Analisis Dasar untuk Desa/Lokasi** : Lakukan penilaian komprehensif yang menetapkan pemahaman dasar tentang kondisi, tantangan, dan peluang terkini di desa/lokasi sasaran, sambil mengidentifikasi variabel intervensi dan mengintegrasikan teknologi dan pendekatan digital. 2. **Mengembangkan Modul (Materi dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas) berdasarkan Peraturan KLHK** : Membuat modul pendidikan dan operasional yang selaras dengan peraturan KLHK untuk memandu pelaksanaan proyek. Materi pendidikan dan operasional ini akan berfungsi sebagai sumber daya penting untuk memandu pelaksanaan proyek di berbagai lokasi PROKLIM. Modul-modul tersebut akan berfokus pada berbagai praktik mata pencaharian berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap komunitas.[[6]](#footnote-5) 3. **Mengadakan Sesi Peningkatan Kapasitas dan Kunjungan** : Merencanakan dan memfasilitasi lokakarya peningkatan kapasitas dan kunjungan ke lokasi proyek yang berhasil, dengan mempertimbangkan letak geografis (jarak desa) dan konteks setempat. 4. **Selenggarakan Sesi Pengembangan Kapasitas dan Keterlibatan Sektor Swasta** : Rencanakan dan fasilitasi lokakarya pengembangan kapasitas dan kunjungan ke lokasi proyek yang berhasil, termasuk inisiatif sektor swasta. Sesi ini akan memberikan kesempatan belajar langsung, yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengamati praktik terbaik dan mengumpulkan wawasan yang dapat langsung diterapkan di komunitas mereka. Keterlibatan dengan sektor swasta juga akan mendorong kolaborasi dan berpotensi membuka jalan baru untuk dukungan dan sumber daya. 5. **Mengembangkan Alat Penilaian:** Membuat alat/dasbor penilaian, termasuk penilaian pra dan pasca, untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas. Alat-alat ini juga akan digunakan untuk menilai catatan data desa terkait pengurangan praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan, kebakaran hutan, dan emisi GRK . Selain itu, alat ini diharapkan dapat mengukur dampak pelatihan pendahuluan terhadap peningkatan akses ke pasar, serta melacak peningkatan keragaman pendapatan melalui berbagai kegiatan seperti produksi tanaman, pengelolaan ternak, wanatani, dan perikanan. 6. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pembangunan Hubungan** :  * Identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan yang penting untuk desain dan implementasi proyek PROKLIM. * Memetakan mitra yang ada meliputi pemerintah daerah kabupaten, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait di provinsi meliputi: Balai PPI dan DLH Kabupaten/Kota. * Membangun sinergi dan kemitraan untuk meningkatkan koordinasi dan saling melengkapi di tingkat kabupaten dan provinsi. * Mengembangkan modalitas untuk kolaborasi erat dengan penerima manfaat, distrik, otoritas provinsi, titik fokus, dan perwakilan masyarakat lokal selama proyek berlangsung, serta memastikan titik kesinambungan untuk keberlanjutan setelah proyek berakhir. | | | | | |

1. **Kategori 2: Dana Hibah Peningkatan Skala untuk Praktik Teknologi Berkelanjutan**

Jenis hibah kedua ditujukan bagi organisasi dengan basis penerima manfaat mapan yang ingin mengujicobakan proyek PROKLIM yang inovatif atau memperluas solusi yang berhasil ke desa/lokasi tambahan. Hibah ini khususnya cocok untuk inisiatif yang telah menunjukkan efektivitas dan dapat secara efektif menargetkan audiens tertentu, memanfaatkan teknologi digital dalam metodologinya.

Fokus utama hibah ini adalah penggunaan teknologi digital dan inovasi sosial untuk meningkatkan akses pasar. Misalnya, platform digital dan aplikasi seluler dapat menghubungkan praktisi praktik mata pencaharian berkelanjutan secara langsung dengan pembeli, sehingga mengurangi ketergantungan pada perantara dan meningkatkan laba.

Selain itu, program pelatihan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan praktisi, memastikan mereka dapat secara efektif menggunakan alat-alat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengakses keuangan dan pasar melalui pengembangan rencana bisnis, akses yang terbukti ke pasar digital, dan peningkatan keberagaman dalam aliran pendapatan, termasuk kegiatan-kegiatan penghasil pendapatan tambahan dan kegiatan-kegiatan bernilai tambah seperti pengemasan dan diversifikasi produk.

| **No** | **Keluaran** | **Indikator Target** | **Hasil** | **Hasil akhir** | **Garis Waktu**  **(untuk mencapai)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. Desa/Lokasi Iklim PROKLIM Baru Didirikan | 10 Desa/Lokasi Iklim Sasaran yang terdaftar di 10 Kabupaten | 1. Kegiatan adaptasi, mitigasi, dan mata pencaharian dimulai. *(lihat bagian 1.6)* 2. Catatan/data menunjukkan peningkatan keyakinan dalam membangun dan meningkatkan penghidupan desa iklim dan aktivitas terkait. | 1. 10 Desa/Lokasi Sasaran (di 10 Kecamatan) Terdaftar sebagai Desa/Lokasi PROKLIM di Sistem Registrasi Nasional (SRN) 2. Data Desa/Lokasi mencatat penurunan praktik pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan | Maret 2025  Februari 2026 |
| 1. 2. . | 2.1. Mata Pencaharian Desa/Lokasi Iklim Diperkuat | Peningkatan mata pencaharian lokal di 10 Desa/Lokasi sasaran Iklim (di 10 kabupaten) | Pendirian desa iklim yang efektif memberikan manfaat bagi penghidupan masyarakat lokal melalui peningkatan kesejahteraan rumah tangga. | 1. Setidaknya 30% dari 10 Desa/Lokasi di 10 distrik akan menjalani pelatihan dan bantuan teknis tingkat lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan akses ke keuangan dan pasar melalui pengembangan rencana bisnis, akses yang terbukti ke pasar digital (partisipasi dalam platform digital); dan dalam meningkatkan keberagaman dalam aliran pendapatan, melalui a) aliran tambahan dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan; b) kegiatan bernilai tambah tambahan (pengemasan, diversifikasi produk, dll.) 2. Setidaknya 30% rumah tangga yang menjadi sasaran pelatihan dan bantuan teknis yang ditingkatkan di 10 desa/Lokasi di 10 distrik menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 20% secara agregat pada akhir proyek. Pelatihan ini juga akan melibatkan penilaian kebutuhan masyarakat dan pengadaan barang yang disesuaikan dengan persyaratan khusus tersebut. 3. Catatan menunjukkan sedikitnya 40% penerima manfaat proyek ini dialokasikan untuk bisnis milik perempuan, serta kelompok terpinggirkan dan pemuda. | Juni 2025  Februari 2026  Juni 2026 |
| 1. 3. | 3.1. Peningkatan sinergi multipihak di tingkat nasional dan daerah | Sinergi multi-stakeholder di tingkat nasional dan lokal | Manajemen aksi iklim yang efektif di semua tingkatan | Catatan menunjukkan peningkatan partisipasi dari pemerintah nasional dan daerah, serta pendukung utama PROKLIM, yang telah meningkatkan keberlanjutan PROKLIM. Selain itu, praktik terbaik telah dicatat untuk peningkatan di masa mendatang.[[7]](#footnote-6) | Juni 2026 |
| 4. | 4.1 Keterlibatan sektor swasta | Surat Pernyataan Minat dari mitra sektor swasta | Membangun ekosistem berkelanjutan tempat bisnis menyediakan sumber daya dan ide, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. | Minimal 4 surat pernyataan minat dari organisasi sektor swasta yang berkomitmen untuk berkolaborasi pada inisiatif komunitas. | Maret 2025 |
| Kegiatannya meliputi hal berikut:   1. **Menyusun Laporan Analisis Dasar untuk Desa/Lokasi** : Melakukan penilaian menyeluruh untuk menetapkan pemahaman dasar tentang kondisi, tantangan, dan peluang terkini di desa/lokasi sasaran, sekaligus mengidentifikasi variabel intervensi dan mengintegrasikan teknologi dan pendekatan digital. Ini termasuk melakukan survei atau diskusi kelompok fokus untuk menilai pemahaman terkini tentang literasi keuangan, perencanaan bisnis, dan pemasaran digital, serta mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan kebutuhan pelatihan khusus. 2. **Mengembangkan Modul (Materi Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan) berdasarkan Peraturan KLHK** : Membuat modul pendidikan dan operasional yang selaras dengan peraturan KLHK untuk memandu pelaksanaan proyek. Modul-modul ini harus mengintegrasikan teknologi digital dan memasukkan pendekatan yang mendukung ekonomi hijau, memastikan bahwa peserta memperoleh keterampilan praktis dan pengetahuan yang relevan dengan praktik berkelanjutan.[[8]](#footnote-7) 3. **Selenggarakan Sesi Pengembangan Kapasitas dan Keterlibatan Sektor Swasta** : Rencanakan dan fasilitasi lokakarya pengembangan kapasitas dan kunjungan ke lokasi proyek yang berhasil, termasuk inisiatif sektor swasta. Sesi ini akan memberikan kesempatan belajar langsung, yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengamati praktik terbaik dan mengumpulkan wawasan yang dapat langsung diterapkan di komunitas mereka. Keterlibatan dengan sektor swasta juga akan mendorong kolaborasi dan berpotensi membuka jalan baru untuk dukungan dan sumber daya. 4. **Mengembangkan Alat Penilaian:** Membuat alat penilaian, termasuk penilaian pra dan pasca, untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas. Alat ini akan menilai dampak dari pelatihan yang ditingkatkan dan bantuan teknis yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengakses keuangan dan pasar. Secara khusus, alat ini akan mengukur kemajuan dalam mengembangkan rencana bisnis, memanfaatkan platform pasar digital, dan meningkatkan keragaman pendapatan melalui kegiatan penghasil pendapatan tambahan dan proses bernilai tambah (seperti pengemasan dan diversifikasi produk). Penilaian juga akan melacak tujuan keseluruhan untuk menunjukkan peningkatan pendapatan agregat sebesar 20% pada akhir proyek. 5. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pembangunan Hubungan** :  * Identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan yang penting untuk desain dan implementasi proyek. * Memetakan mitra kerja yang ada yaitu Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait di daerah kabupaten/provinsi meliputi: Balai PPI dan DLH Kabupaten/Kota. * Membangun sinergi dan kemitraan untuk meningkatkan koordinasi dan saling melengkapi di tingkat kabupaten dan provinsi. * Mengembangkan modalitas untuk kolaborasi erat dengan titik fokus pemerintah distrik dan/atau provinsi, perwakilan masyarakat setempat, dan sektor swasta di seluruh proyek, guna memastikan titik-titik kesinambungan untuk keberlanjutan setelah proyek berakhir.  1. **Mengembangkan dan Memantau Alat Pelacak Peningkatan Pendapatan : Membuat alat /** dasbor untuk melacak dan menilai perubahan pendapatan di rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari program pelatihan dan dukungan. Alat-alat ini akan memastikan bahwa intervensi mengarah pada peningkatan mata pencaharian yang terukur dengan menyediakan data tentang perkembangan pendapatan, mengidentifikasi strategi yang berhasil, dan menyoroti area yang memerlukan dukungan lebih lanjut. | | | | | |

Penerima hibah juga diharuskan untuk menyerahkan rencana Pemantauan dan Evaluasi (M&E) yang komprehensif untuk proyek hibah, yang membahas penilaian formatif selama pelaksanaan dan evaluasi sumatif setelah selesai. Isu-isu utama berikut harus dibahas:

1. Bagaimana kinerja kegiatan hibah akan dilacak dalam hal pencapaian langkah-langkah dan tonggak yang ditetapkan dalam Rencana Pelaksanaan
2. Bagaimana dampak proyek akan dinilai dalam hal pencapaian tujuan proyek (ini harus mencakup data atau metrik yang menunjukkan kemajuan atau dampak setiap aktivitas terhadap tujuan proyek)
3. Bagaimana koreksi dan penyesuaian desain dan rencana di tengah perjalanan akan difasilitasi berdasarkan umpan balik yang diterima
4. Bagaimana partisipasi anggota masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi akan tercapai.

Usulkan indikator yang spesifik dan terukur terkait kinerja dan dampak proyek yang dapat menjadi dasar pemantauan dan evaluasi. Indikator ini akan disempurnakan dan akan menjadi bagian penting dari perjanjian hibah antara organisasi pengusul dan UNOPS.

Teknologi dan Pendekatan Digital yang Memenuhi Syarat:

Mengikuti SO2, yang berfokus pada “Penguatan keterlibatan masyarakat melalui mata pencaharian berkelanjutan yang berbasis bisnis dan diberdayakan oleh teknologi digital” teknologi dan intervensi yang memenuhi syarat harus mencakup:

1. Teknologi digital yang meningkatkan produktivitas dan mendukung akses pasar.
2. Intervensi difokuskan pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan praktik, teknologi, dan solusi digital yang memantau dan mengelola emisi.
3. Solusi untuk pengelolaan limbah yang efektif, termasuk teknologi daur ulang, sistem pelacakan limbah, dan platform digital untuk pengurangan limbah.
4. Teknologi dan intervensi yang mempromosikan kesetaraan gender dalam keterlibatan masyarakat, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama dari inisiatif berbasis digital dan bisnis.

## 1.5. Sasaran penerima manfaat

Penetapan proyek PROKLIM diharapkan dapat meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal di 100 desa/lokasi [[9]](#footnote-8)di 10 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Hal ini akan dicapai dengan mendorong peningkatan mata pencaharian rendah karbon yang tangguh terhadap kekeringan, banjir, dan gelombang panas berkala, serta dengan memperkuat ekosistem yang lebih tangguh.

| Oke | PALI | Banyuasin | Musi Rawas | Ogan Ilir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pulih Dusun 3 Desa Suka | Curup | Tanjung Menang | Desa Wonokerto | Ulak Kembahan 1 |
| Pulau Beruang | Prambatan | Sri Bandung | Rejo Sari | Ulak Kemhang 2 |
| Talang Jaya | Pandan | Limbang Mulya | Sadarkarya | Muara Dua |
| Sungai Menang | Sungai Ibul | Sungai Rengit | Sumber jaya | Pulau Negara |
| Dusun 7 Desa Pulau Geronggang | Suka Damai | Sungai Pinang | Mardiharjo | Seri Dalam |
| Petaling | Sedupi | Sri Kembang | Purwakarya | Tanjung Pule |
| Kelurahan Kedaton | Pangabuan | Suka Pindah | Wonosari | Sunur |
| Jungkal | Karang Agung | Teluk Betung | Ngadirejo | Arisan Jaya |
| Lebung Itam | Talang Ubi Timur | Sumber Mekar Mukti | Petrans Jaya | Pulau Kabal |
| Kayu Labu | Suka Maju | Desa Bunga Karang | Megang Sakti IV | Ulak Petangisan |

| Musi Banyuasin | Empat Lawang | Prabumulih | OKU Timur | Musi Rawas Utara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pangkalan Tungkal | Karang Dapo Baru | Kelurahan Gunung Ibul Utara | Kurungan Nyawa III | Biaro Lama |
| Berlian Jaya | Galang | Kelurahan Karang Jaya | Pahang Asri | Surulangun |
| Senawar Jaya | Simpang Perigi | Kelurahan Gunung Kemala | Desa Sukaraja | Simpang Nibung Rawas |
| Lubuk Harjo | Muara Kalangan | Kelurahan Patih Galung | Kurungan Nyawa I | Lubuk Mas |
| Kali Berau | Padang Tepong | Tebing Tanah Puteh | Kurungan Nyawa II | Sungai Kijang |
| Kertajaya | Tanah | Kelurahan Prabumulih | Kurungan Nyawa | Setia Marga |
| Tanjung Raya | Gunung Meraksa Baru | Kelurahan Payuputat | Saung Dadi | Teladas |
| Nganti | Gunung Meraksa Lama | Karang Raja | Trantang Sakti | Kerta Dewa |
| Talang Leban | Kelurahan Pendopo | Kelurahan Muntang Tapus | Pemetung Basuki | Desa Sungai Jauh |
| Mekar Jaya | Tanjung Raya | Kelurahan Tanjung Menang | Sukaraja Tuha | Desa Lesung Batu Muda |

Gambar 1. Daftar awal 100 Desa/Lokasi PROKLIM

## 

## 1.6. Kegiatan yang mendapat hibah/pendanaan

Penerima hibah diharuskan merancang kegiatan dan modul yang selaras dengan:

1. Peraturan Menteri P.84 MENLHK-SETJEN/KUM.1/1/2016 tentang Program Desa Iklim, dan
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P4/PPI/API/PPI.0/3/2023 yang memberikan pedoman bagi pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Kegiatan-kegiatan ini harus secara efektif mendukung tujuan-tujuan yang diuraikan dalam peraturan-peraturan ini dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja mereka, mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Jenis-jenis kegiatan yang akan disertakan adalah:

1. Sosialisasi
2. Layanan Jangkauan
3. Peningkatan Kapasitas
4. Pendampingan dan Dukungan
5. Bantuan Teknis
6. Pemfasilitasan Implementasi
7. Pengembangan Database PROKLIM

Kegiatan-kegiatan ini merupakan komponen penting dari kerangka kerja, dengan masing-masing jenis memainkan peran tersendiri dalam meningkatkan efektivitas keseluruhan intervensi yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam program-program PROKLIM. Selain itu, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri, penerima hibah juga harus mempertimbangkan bidang-bidang berikut yang terkait dengan Program Desa Iklim, yang mencakup tiga komponen kegiatan utama: tindakan adaptasi, tindakan mitigasi, dan aspek-aspek yang mendukung kesinambungan kegiatan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal. Bidang-bidang ini sangat penting untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, guna memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Komponen-komponen utama dan sub-komponen PROKLIM ini mencakup komponen-komponen yang biasanya dilakukan oleh inisiatif PROKLIM KLHK di Indonesia:

| **Adaptasi** | **Mitigasi** |
| --- | --- |
| Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kekeringan, banjir dan tanah longsor | Pengelolaan limbah padat dan cair |
| Meningkatkan ketahanan pangan daerah setempat | Pemanfaatan energi terbarukan, konservasi energi dan penghematan energi |
| Tindakan pencegahan kenaikan muka air laut, intrusi air laut, abrasi, gelombang tinggi | Pengelolaan lahan pertanian untuk memitigasi dan mendukung rendahnya emisi GRK |
| Langkah-langkah untuk mengurangi dan mengendalikan penyakit yang berhubungan dengan iklim | Peningkatan dan pelestarian tutupan vegetasi, dan pencegahan kebakaran hutan |
| Kegiatan lain yang meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. | Kegiatan lain yang membantu mengurangi emisi GRK. |

| **Kegiatan untuk memastikan keberlanjutan proyek** |
| --- |
| Membentuk kelompok masyarakat yang bertanggung jawab terhadap tindakan iklim lokal |
| Mendukung kebijakan di tingkat lokal yang meningkatkan implementasi program |
| Meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan |
| Dukungan dari aktor eksternal seperti Pemerintah, LSM, sektor swasta, akademisi dan pemangku kepentingan terkait lainnya |
| Memastikan partisipasi gender yang adil |
| Manfaat bersama bagi masyarakat dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mitigasi risiko bencana terkait iklim. |
| Kegiatan lain yang dapat mendukung kesinambungan aksi iklim di tingkat lokal |

Gambar 2. Komponen utama dan subkomponen PROKLIM (diadaptasi dari Peraturan Menteri, 2016)

Beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi juga tertuang dalam Peraturan DGCC, sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:

| **Kegiatan adaptasi** | | |
| --- | --- | --- |
| **Pengendalian kekeringan, banjir dan tanah longsor** | **Meningkatkan ketahanan pangan** | **Pengendalian penyakit akibat iklim** |
| Pemanenan air hujan | Penerapan pola tanam untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim | Pengendalian vektor (Pembawa penyakit) |
| Penyerapan air | Sistem atau model irigasi untuk mengatasi gagal panen | Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) |
| Perlindungan mata air | Sistem pertanian untuk mengatasi kegagalan panen dan ketersediaan pangan | Bersih dan Sehat  Gaya Hidup (PHBS) |
| Menghemat penggunaan air | Diversifikasi tanaman pangan | - |
| Fasilitas dan Pengendalian Banjir Infrastruktur Longsor | Pengelolaan pesisir terpadu | - |
| Desain adaptif | Pertanian perkotaan | - |
| Membuat Terasering | - | - |
| Struktur pelindung alam atau sabuk hijau yang membentang sejajar dengan garis pantai | - | - |
| Struktur pelindung buatan | - | - |
| Relokasi | - | - |

| **Kegiatan mitigasi** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pengelolaan limbah, limbah padat dan cair** | **Menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi** | **Melaksanakan budidaya pertanian rendah emisi GRK** | **Meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi** | **Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan** |
| Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat | Penggunaan Energi Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi | Budidaya pertanian rendah emisi gas rumah kaca | Peningkatan cakupan | Pembukaan lahan tanpa pembakaran |
| Pengolahan Limbah dan Pemanfaatan Limbah Cair | Penggunaan sumber energi tak terbarukan | - | Menjaga tutupan vegetasi | Pengelolaan air gambut |
| - | Konservasi energi | - | - | Pengendalian Kegiatan Kebakaran Hutan dan Lahan |

Gambar 3. Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi (diadaptasi dari Peraturan DGCC, 2023)

## 1.7. Hibah/pendanaan tersedia

### Jumlah total hibah/pendanaan yang tersedia

Tabel berikut menunjukkan jumlah total hibah/pendanaan yang tersedia berdasarkan Panggilan Proposal ini.

| **Kategori** | **Tujuan** | **Mata uang** | **Jumlah** | **Jumlah dalam kata-kata** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Hibah Literasi Iklim dan Pemberdayaan Masyarakat** | Dolar Amerika | perkiraan 659.430 | Enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh |
| **2** | **Hibah Peningkatan Skala untuk Praktik Teknologi Berkelanjutan** | Dolar Amerika | perkiraan 93.270 | Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh |

Organisasi yang mengajukan permohonan berdasarkan Panggilan Proposal ini dapat mengajukan permohonan untuk satu atau kedua Kategori yang tercantum di atas. Jumlah di atas adalah total dana yang tersedia berdasarkan Panggilan Proposal ini. Beberapa penerima hibah dapat dipilih untuk masing-masing Kategori di atas. Konsorsium didorong untuk mengajukan permohonan.

## 1.8. Durasi hibah/pendanaan

Durasi hibah/pendanaan yang diharapkan adalah:

| **BERTAHUN-TAHUN)** | [1] | **BULAN** | [5] |
| --- | --- | --- | --- |

## 

## 1.9. Kelayakan pelamar

### Kategori pelamar

Kategori pelamar berikut ini berhak mengajukan lamaran melalui Panggilan Proposal ini:

| * Organisasi non-pemerintah (LSM) |  |
| --- | --- |
| * Yayasan |  |
| * Organisasi masyarakat adat (IPO) |  |
| * Organisasi masyarakat sipil (CSO) |  |
| * Organisasi akar rumput |  |
| * Lembaga atau federasi |  |
| * Organisasi etnis |  |
| * Lembaga akademis dan penelitian |  |
| * Cabang pemerintahan lokal atau regional, seperti kotamadya |  |
| * Entitas yang mencari keuntungan |  |
| * Individu |  |
| * Badan-badan pemerintah tingkat pusat |  |
| * Organisasi antarpemerintah non-PBB |  |
| * Organisasi sistem PBB |  |
|  |  |

### Negara pendaftaran dan kewarganegaraan pemohon

Pelamar yang termasuk atau dikecualikan berdasarkan Panggilan Proposal ini sehubungan dengan negara pendaftaran dan kewarganegaraan (untuk individu) adalah sebagai berikut:

Open to all countries Namun, penerima hibah harus memiliki kehadiran di negara tersebut dan harus terakreditasi untuk beroperasi di wilayah geografis yang relevan.

### Kondisi tambahan ketidaklayakan

Pemohon tidak termasuk dalam salah satu kondisi yang tercantum dalam[Petunjuk untuk Pelamar](https://content.unops.org/service-Line-Documents/Infrastructure/Grant-Support-Call-for-Proposals-Instructions-to-Applicants_EN.pdf) , Pasal 1, yang

membuat pelamar tidak memenuhi syarat untuk hibah/pendanaan ini.

## 1.10. Isi pengajuan proposal

Pelamar harus menyertakan hal-hal berikut:

* **Profil Organisasi**
* **Profil Personel Organisasi**
* **Laporan akhir, dan/atau surat referensi dari dua proyek terbaru**
* **Salinan laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir**
* **Salinan rekening bank dan bukti otorisasi untuk menerima dana hibah di Indonesia**
* **Lampiran 1: Proposal**
* **Lampiran 2: Proposal Keuangan**
* **Lampiran 3: Deklarasi**
* **Lampiran 4: Perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual (PSEA) yang menerapkan penilaian mandiri pasangan**

Pelamar harus membaca dan memahami dengan seksama[Persyaratan](#_46r0co2) dalam Panggilan Proposal ini dan [Instruksi kepada Pelamar](https://content.unops.org/service-Line-Documents/Infrastructure/Grant-Support-Call-for-Proposals-Instructions-to-Applicants_EN.pdf) sebelum menyelesaikan Proposal dan Lampiran.

## 1.11. Subhibah [[10]](#footnote-9)dan kontrak[[11]](#footnote-10)

Subhibah dan kontrak hanya diperbolehkan berdasarkan Panggilan Proposal ini sebagaimana berikut:

| **Pemberian hibah lanjutan** | **Diperbolehkan** |
| --- | --- |
| **Kontrak** | **Diperbolehkan** |

Di samping itu, untuk memastikan pengembangan kapasitas penerima hibah dalam proyek PROKLIM, fasilitas hibah akan mendorong proposal konsorsium yang mencakup penerima hibah utama dan mitra lokal mereka - baik penerima hibah profesional maupun organisasi masyarakat dan akar rumput - sehingga pemohon utama dapat membantu mitra mereka dalam pelaksanaan proyek, pelaporan, pemantauan, dan pembelajaran.

## 1.12. Mata uang proposal

Anggaran proposal harus disiapkan dalam mata uang berikut:

Dolar Amerika Serikat (USD)

## 1.13. Bahasa proposal

Semua proposal, informasi, dokumen dan korespondensi yang dipertukarkan antara UNOPS dan pemohon harus dalam kedua bahasa:

**English Bahasa Indonesia**

## 1.14. Pengajuan proposal

Batas akhir penyerahan proposal adalah **Jan 13, 2025**.Proposal harus diserahkan menggunakan metode berikut:

**e-Mail**

Lihat Pasal 10, “Pengajuan Proposal”, dari [Instruksi kepada Pelamar](https://content.unops.org/service-Line-Documents/Infrastructure/Grant-Support-Call-for-Proposals-Instructions-to-Applicants_EN.pdf) untuk rincian tentang persyaratan khusus untuk pengajuan proposal.

## 

## 1.15. Jenis instrumen hukum

Instrumen hukum yang berlaku diidentifikasi di bawah ini.

* Perjanjian Dukungan Hibah
* Perjanjian PBB2PBB
* [Perjanjian Kerjasama Proyek](https://docs.google.com/document/d/1Ps4wutcZ4jExURrAt7Ml1F75H_1OzIKXi_JVB8vmyYQ/edit?usp=share_link)

## 

## 1.16. Informasi kontak

#### 

Semua korespondensi, pemberitahuan dan permintaan klarifikasi sehubungan dengan Panggilan Proposal ini harus dikirimkan ke:

| **Nama** | Marco Scarpetta |
| --- | --- |
| **Judul** | Manajer Proyek |
| **E-mail** | marcosc@unops.org |

| **Nama** | Siti Maskurotul AINIA |
| --- | --- |
| **Judul** | PMSSO (Pejabat Senior Dukungan Manajemen Proyek) |
| **E-mail** | situs@unops.org |

## 

## 1.17. Tanggal dan tenggat waktu penting

#### 

Tabel berikut mencantumkan tanggal-tanggal penting dan tenggat waktu yang berkaitan dengan Panggilan Proposal ini.

|  | Tanggal | Waktu | Zona waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| Pengajuan proposal | **Jan 13, 2025** | [23:59] | [GMT+7] |
| Permintaan klarifikasi | **Jan 20, 2025** | [10:00] | [GMT+7] |
| Tanggal mulai perjanjian yang diharapkan | **Feb 10, 2025** | [10:00] | [GMT+7] |

|  | Tanggal | Waktu | Jenis | Informasi tambahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesi informasi | **Jan 7, 2025** | [14:00] | **Virtual** | Apabila terdapat beberapa pertanyaan atau klarifikasi terkait dengan Call for Proposals, silakan merujuk pada link berikut [Request Clarifications](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXIGZ4Bwiovl4aFDcZjaHI4QFrNZdMrKuDI9mRkwY0E/edit?gid=0#gid=0)  Untuk sesi informasi, calon penerima hibah dapat meminta rincian dari PMSSO dengan mengirim email ke Siti Maskurotul Ainia di [sitia@unops.org](mailto:sitia@unops.org) |

# 2. PERSYARATAN

## 2.1. Pendekatan dan metodologi

Dalam penyusunan proposal ini, Pemohon diminta untuk memberikan informasi mengenai bagaimana rencananya untuk mengatasi isu-isu lintas sektor berikut ini:

##### **Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan**

##### **Persyaratan Sosial dan Lingkungan (seperti gender dan inklusi sosial)**

Untuk melaksanakan proyek PROKLIM, penting untuk mematuhi Standar Sosial dan Lingkungan (SES) UNDP. Ini berarti bahwa proyek PROKLIM harus mematuhi prinsip, standar, dan prosedur UNDP yang terkait dengan perlindungan sosial dan lingkungan. Tujuan SES UNDP adalah untuk memastikan bahwa dampak sosial dan lingkungan yang merugikan serta risiko kegiatan proyek diidentifikasi dan dinilai sejak dini, untuk menghindari, mengurangi, atau mengelola risiko ini dengan tepat sebelum/selama pelaksanaan. Tujuannya juga untuk memastikan partisipasi penuh dan efektif dari para pemangku kepentingan dalam keputusan dan pelaksanaan proyek. Secara keseluruhan, SES dimaksudkan untuk memperkuat dampak sosial dan lingkungan dari proyek selama pelaksanaannya.

Sesuai dengan kebijakan SES UNDP, Prosedur Penyaringan Sosial dan Lingkungan (SESP) diterapkan pada proyek PROKLIM selama fase Hibah Persiapan Proyek (PPG), dan dimasukkan sebagai lampiran Dokumen Proyek. Penyaringan ini mengidentifikasi berbagai potensi dampak sosial dan lingkungan yang terkait dengan kegiatan proyek, dan berdasarkan hasil SESP dan sesuai dengan prosedur UNDP, beberapa kerangka kerja dan rencana pengelolaan disiapkan. Ini termasuk:

* Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP)
* Rencana Aksi Gender (GAP)
* Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)
* Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)
* Penyandang disabilitas, Keluarga berpenghasilan rendah, Individu yang tinggal di pedesaan atau daerah kurang beruntung, Masyarakat adat, LGBTQI+, dan kelompok minoritas/kurang terwakili lainnya.

Rencana yang dikembangkan memberikan prinsip-prinsip umum dan panduan untuk memastikan bahwa proyek PROKLIM tidak menimbulkan dampak dan risiko sosial dan lingkungan yang merugikan, dan memberikan panduan tentang penerapan SES selama pelaksanaan proyek.

Dalam konteks kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan perjanjian Hibah ini, Penerima Hibah akan diminta untuk melengkapi SESP khusus guna mengidentifikasi potensi risiko sosial dan lingkungan yang khusus terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika kegiatan yang akan dilaksanakan selama perjanjian Hibah memicu risiko yang signifikan, Penerima Hibah mungkin diminta untuk mengembangkan langkah-langkah penilaian dan pengelolaan sosial atau lingkungan, sebagaimana mestinya, dan akan ditentukan dengan Unit Koordinasi dan Manajemen Proyek PROKLIM.

*Pemohon diminta dengan hormat untuk menyerahkan sebagai bagian dari proposalnya:*

1. *Uraian tentang kebijakan yang dimilikinya mengenai pengamanan sosial dan lingkungan, jika ada, dan bagaimana rencananya untuk menerapkan langkah-langkah pengamanan dalam kegiatan proyek.*
2. Jelaskan bagaimana pertimbangan pengarusutamaan gender atau penilaian gender akan dimasukkan ke dalam kegiatan.
3. Jelaskan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan akan ditangani selama pelaksanaan kegiatan, termasuk potensi keterlibatan dengan masyarakat adat.

##### **Persyaratan Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual**

*Menjelaskan tindakan yang harus diambil atau kebijakan kelembagaan yang ditujukan untuk menghindari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual selama kegiatan.*

##### **Persyaratan Keberlanjutan.**

*Menjelaskan tindakan yang akan diambil atau kebijakan kelembagaan yang ditujukan untuk mempromosikan keberlanjutan.*

## 2.2. Persyaratan Rencana Implementasi

Dengan menggunakan keluaran, hasil akhir, dan kegiatan yang diusulkan, dengan tujuan untuk mencapai hasil hibah/pendanaan, selesaikan Rencana Pelaksanaan. Rencana Pelaksanaan harus secara akurat menunjukkan urutan dan jangka waktu untuk penyampaian setiap kegiatan dan keluaran.

Harap sesuaikan jangka waktu sesuai dengan panjang kegiatan yang direncanakan (triwulan tahunan dapat digunakan sebagai pengganti minggu/bulan)

## 2.3. Menerapkan Persyaratan Rencana Pemantauan Mitra

Lengkapi Rencana Pemantauan Mitra Pelaksana (IP). Rencana Pemantauan harus memungkinkan Penerima Hibah untuk menilai kemajuan menuju pencapaian hasil dan keluaran yang diusulkan, seperti yang disajikan dalam bagian 1.2, 1.4, dan 4.4.

## 2.4. Persyaratan anggaran

1. Plafon Anggaran: seperti yang tertera pada bagian 1.7
2. Anggaran minimal harus mencakup:
   1. Perkiraan biaya langsung, yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk, dan dapat dilacak langsung ke, akun hibah/pendanaan. Biaya langsung harus dipecah berdasarkan subkategori biaya, berdasarkan pos biaya, dan berdasarkan tahun.
   2. Deskripsi asumsi atau justifikasi yang mendasari estimasi
3. Biaya-biaya tersebut hanya akan memenuhi syarat apabila biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk tujuan hibah/pendanaan ini dan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam instrumen hukum (termasuk setiap amandemennya)
4. Ada pembatasan pendanaan gaji pemerintah yang dirinci dalam Bagian 6.2 dari [Petunjuk Operasional (OI) tentang Dukungan Hibah.](https://drive.google.com/file/d/1BFNUvq_Wrx1ykhPuL907xv0XhwIoECbM/view) Pembatasan ini harus dipertimbangkan saat menganggarkan gaji pemerintah, jika berlaku.
5. Pasal II, Bagian 7, Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan, antara lain, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk UNOPS sebagai badan pembantu, dibebaskan dari semua pajak langsung, kecuali biaya untuk layanan utilitas publik, dan dibebaskan dari pembatasan bea cukai, bea, dan biaya yang sejenis sehubungan dengan barang-barang yang diimpor atau diekspor untuk penggunaan resminya. Semua proposal harus diserahkan tanpa pajak langsung dan pajak serta bea lainnya.
6. Anggaran hibah dapat mencakup biaya tidak langsung hingga 10% dari biaya langsung. Dalam kasus hibah lanjutan, biaya tidak langsung pada jumlah hibah lanjutan harus dihitung dan disajikan secara terpisah.

# 3. METODE DAN KRITERIA EVALUASI

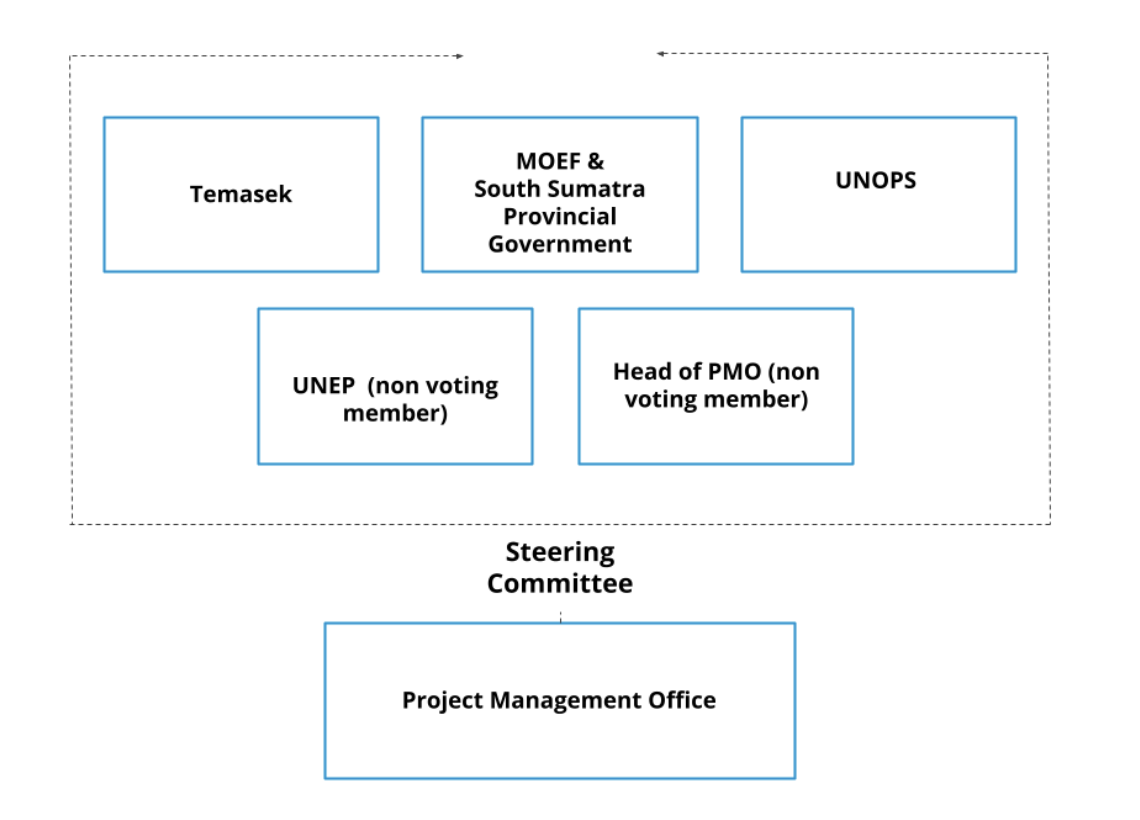
Proposal yang diajukan sebagai tanggapan terhadap dokumen CFP ini akan dievaluasi mengikuti metodologi analisis kumulatif, yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. [**Penyaringan awal :**](#_3cqmetx) Ini termasuk penilaian apakah proposal mematuhi kriteria formal dan kelayakan yang dinyatakan dalam [Tabel 1: Kriteria formal dan kelayakan](#_1rvwp1q) . Semua proposal yang lolos tahap ini akan melalui evaluasi berikutnya sebagai berikut.
2. [**Evaluasi teknis :**](#_1664s55) Ini menilai poin teknis yang dicapai oleh setiap proposal, sesuai dengan poin maksimum yang dapat diperoleh yang ditetapkan per kelompok kriteria dalam [Tabel 2.1: Bagian dari evaluasi proposal teknis](#_kgcv8k) . Hanya proposal yang memenuhi ambang batas minimum yang ditunjukkan dalam [Tabel 2: Kriteria teknis](#_3q5sasy) yang akan dianggap patuh pada tahap ini. Evaluasi proposal teknis akan diselesaikan sebelum membuka proposal keuangan.
3. [**Evaluasi keuangan:**](#_xvir7l)Proposal keuangan hanya akan dibuka untuk proposal yang telah mencapai ambang batas minimum dalam evaluasi teknis. Proposal keuangan akan diperiksa untuk setiap kesalahan matematika sesuai dengan Pasal 15, “Informalitas Kecil, Kesalahan atau Kelalaian” dalam[**Petunjuk untuk Pelamar**](https://content.unops.org/service-Line-Documents/Infrastructure/Grant-Support-Call-for-Proposals-Instructions-to-Applicants_EN.pdf) . Total poin proposal keuangan yang dicapai untuk setiap proposal ditentukan sesuai dengan [Tabel 3: Kriteria keuangan](#_3hv69ve) .
4. **Analisis gabungan:** Evaluasi ini akan dilakukan berdasarkan analisis gabungan, yang menganalisis semua biaya, risiko, dan manfaat yang relevan untuk setiap proposal. Analisis gabungan mencakup skor dari evaluasi teknis, termasuk faktor-faktor seperti risiko, keberlanjutan, dan lain-lain, dan evaluasi finansial, menggunakan metode pembobotan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jumlah poin maksimum yang dapat diperoleh pelamar untuk proposalnya adalah sebagai berikut:

* Proposal teknis: 70 poin
* Proposal keuangan: 30 poin

Jumlah poin maksimum yang dapat diperoleh pelamar untuk proposal teknis dan finansial adalah 100. Pembobotan proposal teknis dan finansial adalah 70:30. Kriteria yang disertakan dalam tabel berikut adalah contoh dari apa yang dapat disertakan dalam setiap jenis kriteria. Evaluasi harus mencakup kriteria formal dan kelayakan, kriteria teknis, dan kriteria finansial, tetapi kriteria individual tertentu dalam masing-masing dari ketiga area ini dapat dimodifikasi, dihapus, atau ditambahkan sebagaimana diperlukan untuk dokumen CFP ini.

UNOPS , yang melibatkan perwakilan dari sumber pendanaan, Pemerintah Indonesia, UNOPS, dan pemangku kepentingan lainnya, akan membuat keputusan akhir. Sebagai lembaga yang mengemban tanggung jawab fidusia proyek dan yang menandatangani perjanjian kontribusi dengan donor (Yayasan Temasek), UNOPS dan MoEF akan menjadi ketua bersama Dewan Proyek. Dewan Proyek akan bertanggung jawab atas pemilihan hibah, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim Proyek. UNOPS akan bertanggung jawab atas pemberian hibah akhir berdasarkan rekomendasi dari Dewan Proyek dan penilaian kapasitas penerima hibah terpilih yang dilakukan oleh PMO.

Gambar 4. Tata Kelola Proyek PROKLIM: Komite Pengarah

Namun, UNOPS dapat meminta klarifikasi atau informasi lebih lanjut secara tertulis dari para pelamar kapan saja selama proses evaluasi. Dalam hal ini, tanggapan apa pun dari pelamar tidak boleh mengubah substansi proposal, termasuk aspek teknis dan finansial dari proposal tersebut. UNOPS dapat menggunakan informasi tersebut untuk menafsirkan dan mengevaluasi proposal yang relevan.

Evaluasi proposal oleh UNOPS akan dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi yang dijelaskan dalam tabel berikut.

## 3.1. Penyaringan awal

| Tabel 1 KRITERIA FORMAL DAN KELAYAKAN | |
| --- | --- |
| **Kriteria yang dievaluasi berdasarkan lulus/gagal selama penyaringan awal** | **Dokumen untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria** |
| 1. Pemohon memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1, “Kelayakan Pemohon” dalam [Instruksi kepada Pemohon](https://content.unops.org/service-Line-Documents/Infrastructure/Grant-Support-Call-for-Proposals-Instructions-to-Applicants_EN.pdf) . | * Lampiran 1: Proposal (Termasuk rencana implementasi dan rencana keuangan) * Lampiran 2: Proposal Keuangan * Lampiran 3: Deklarasi * Lampiran 4: Penilaian mandiri mitra pelaksana PSEA  Bukti akreditasi: Organisasi pemohon memiliki akreditasi yang masih berlaku dan tidak masuk dalam daftar hitam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.Sertifikasi pendirian pemohon: Pemohon telah beroperasi terus-menerus selama 3 tahun terakhir.  * Memiliki rekening bank di Indonesia dan berwenang menerima dana hibah langsung dari UNOPS * Mampu memiliki perwakilan yang dapat menandatangani perjanjian layanan hibah dengan UNOPS, jika proposal tersebut dipilih. * Pernah melaksanakan proyek di Provinsi Sumatera Selatan dengan portofolio dan rekam jejak kinerja yang baik, khususnya di bidang perubahan iklim *(diinginkan)* |
| 1. Proposal lengkap dan menyertakan semua formulir yang sudah diisi dan dokumentasi lain yang diminta dalam [Rincian, 'Isi pengajuan proposal'](#_3o7alnk) . | * Semua dokumentasi yang diminta dalam [Rincian, 'Isi pengajuan proposal'](#_3o7alnk) |
| 1. Pemohon menyetujui ketentuan dalam format persetujuan, sebagaimana ditetapkan dalam Rincian [, 'Jenis instrumen hukum'](#_vx1227) . | * **Lampiran 3: Deklarasi** |

## 3.2. Evaluasi teknis

| Tabel 2 KRITERIA TEKNIS | |
| --- | --- |
| **Kriteria yang dievaluasi berdasarkan penilaian selama evaluasi teknis** | **Dokumen untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria** |
| Jumlah poin teknis maksimum yang dapat diperoleh dirinci dalam [Tabel 2.1: Bagian dari evaluasi proposal teknis](#_kgcv8k) .  Agar memenuhi persyaratan teknis, pelamar harus memperoleh ambang batas minimal 70% dari total poin yang dapat diperoleh. | * **Lampiran 1: Proposal** * **Laporan akhir, dan/atau surat referensi dari dua proyek terbaru[[12]](#footnote-11)** |

|  | Tabel 2.1 Bagian-bagian evaluasi proposal teknis | **Poin yang bisa diperoleh** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Kapasitas dan keahlian pelamar | 20 |
| **2.** | Metodologi, pendekatan dan rencana implementasi yang diusulkan | 40 |
| **3.** | Personel kunci yang diusulkan | 10 |
| **4.** | Evaluasi keuangan | 30 |
| **Total poin proposal teknis** | | **100** |

|  | Tabel 2.1.1 Bagian 1: Kapasitas dan keahlian pelamar (20 poin) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIDAK.** | **Kriteria yang akan dievaluasi** | **Dokumen untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria** (tidak lengkap) | **Poin yang bisa diperoleh** |
| **1.1** | Pemohon mempunyai kemampuan organisasi umum untuk mendukung implementasi yang efektif: struktur manajemen; stabilitas keuangan dan kapasitas pembiayaan proyek; pengendalian manajemen; dan sejauh mana pekerjaan akan dihibahkan/dikontrakkan. | * **Profil organisasi[[13]](#footnote-12)** * **Salinan laporan keuangan yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir** | 5 |
| **1.2** | Pelamar memiliki pengetahuan khusus dalam perubahan iklim dan memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam kegiatan terkait yang menekankan keuangan, gender, dan teknologi, termasuk solusi digital. | * **Profil organisasi** | 5 |
| **1.3** | Proyek yang ada dari pemohon melengkapi hibah ini  mendukung aktivitas proyek. | * **Profil organisasi** | 3 |
| **1.4** | Pemohon telah menunjukkan pengalaman dan kehadiran dalam memberikan dukungan dan kegiatan proyek serupa dalam tiga tahun terakhir sebelum Panggilan Proposal (CfP) ini. | * **Profil organisasi** | 3 |
| **1.5** | Pemohon membiayai dan/atau mengoperasikan kegiatan-kegiatan di provinsi-provinsi penerima manfaat yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.5 yang mendukung tercapainya hasil dan keluaran yang diusulkan dari Hibah ini. | * **Profil organisasi** | 4 |
| **Total poin untuk Bagian 1** | | | **20** |

|  | Tabel 2.1.2 Bagian 2: Metodologi, pendekatan dan rencana implementasi yang diusulkan (40 poin) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIDAK.** | **Kriteria yang akan dievaluasi** | **Dokumen untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria** (tidak lengkap) | **Poin yang bisa diperoleh** |
| **2.1** | Proposal ini pada dasarnya mematuhi dan tidak mengandung penyimpangan material apa pun dari persyaratan minimum sebagaimana ditetapkan dalamdokumen CfP ini, yang menunjukkan pemahaman pemohon terhadap persyaratan ini. | * **Lampiran 1: Proposal** | 5 |
| **2.2** | Pendekatan dan metodologi yang diusulkan pemohon konsisten dengan tujuan dan hasil yang ditargetkan dari hibah/pendanaan dan tujuan kegiatan proyek UNOPS di mana peluang hibah/pendanaan ini tersedia. | * **Lampiran 1: Proposal** | 5 |
| **2.3** | Pendekatan ini dapat dilaksanakan mengingat lingkungan operasi (misalnya, akses, keamanan, kondisi iklim, dll.). | * **Lampiran 1: Proposal** | 5 |
| **2.4** | Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Pelaksanaan selaras dengan pendekatan dan metodologi yang diusulkan. Rencana Pelaksanaan menunjukkan kapasitas pemohon untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek dukungan hibah dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk penyertaan indikator yang dapat diverifikasi untuk memantau kegiatan.  terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan keluaran yang nyata. | * **Lampiran 1: Proposal** | 5 |
| **2.5** | Pemohon telah mengidentifikasi keluaran nyata yang secara jelas mendukung tercapainya hasil dan keluaran yang diharapkan. | * **Lampiran 1: Proposal** | 5 |
| **2.6** | Proposal tersebut secara memuaskan menunjukkan bahwa persyaratan Kesehatan, Keselamatan, Sosial, dan Lingkungan (HSSE) sehubungan dengan kegiatan proyek dukungan hibah akan dipenuhi. | * **Lampiran 1: Proposal** | 5 |
| **2.7** | Proposal tersebut secara memuaskan menunjukkan bahwa persyaratan Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA) sehubungan dengan kegiatan proyek dukungan hibah akan dipenuhi. | * **Lampiran 1: Proposal** | 5 |
| **2.8** | Proposal ini memberikan strategi untuk terlibat dengan  penerima manfaat dan pemangku kepentingan terkait serta memastikan keluaran proyek diarusutamakan ke dalam aksi iklim di tingkat distrik. | * **Lampiran 1: Proposal** | 5 |
| **Total poin untuk Bagian 2** | | | 40 |

|  | Tabel 2.1.3 Bagian 3: Personel kunci yang diusulkan (10 poin) | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIDAK.** | **Kriteria yang akan dievaluasi** | **Dokumen untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria** (tidak lengkap) | **Poin yang bisa diperoleh** |
| **3.1** | Komposisi dan struktur tim yang diusulkan pemohon sudah tepat dan peran manajemen yang diusulkan serta peran personel kunci lainnya sesuai untuk pelaksanaan kegiatan proyek dukungan hibah. | * **Profil Personel Organisasi** * **Lampiran 1: Proposal** | 4 |
| **3.2** | Kualifikasi dan pengalaman kandidat kunci yang diusulkan  Personel memenuhi persyaratan yang ditetapkan:  Kategori 1  ● Koordinator Proyek / Titik Fokus  ● Pakar perubahan iklim  ● Pakar penjangkauan masyarakat  Kategori 2  ● Koordinator Proyek / Titik Fokus  ● Pakar perubahan iklim  ● Ahli pengembangan bisnis   * Ahli teknologi digital | * **Profil Personel Organisasi** * **Lampiran 1: Proposal** | 4 |
| **3.3** | Pemohon menjelaskan dan membenarkan rencananya untuk ukuran dan komposisi timnya. | * **Profil Personel Organisasi** * **Lampiran 1: Proposal** | 2 |
| **Total poin untuk Bagian 3** | | | **10** |

## 3.3. Evaluasi Keuangan

| Tabel 3 KRITERIA KEUANGAN (30 poin) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kriteria yang dievaluasi berdasarkan metodologi analisis kumulatif selama evaluasi keuangan** | | **Dokumen untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria** | **Poin yang bisa diperoleh** |
| **1.** | Total Anggaran: Maksimal 10 poin akan diberikan pada total anggaran terendah yang diajukan. Total anggaran pelamar lain yang secara substansial memenuhi persyaratan akan dinilai menurut rumus berikut:  Poin untuk jumlah anggaran =  [jumlah anggaran total terendah] x [poin maksimum yang dialokasikan untuk jumlah anggaran total]  —----------------------------------------------------  [Jumlah total anggaran proposal yang sedang dievaluasi] | * **Lampiran 2: Proposal Keuangan** | 10 |
| **2.** | Organisasi pemohon mematuhi anggaran maksimum yang ditetapkan dalam [persyaratan Anggaran](#_3ygebqi) . | * **Lampiran 2: Proposal Keuangan** | 5 |
| **3.** | Pemohon telah memberikan justifikasi yang cukup mengenai jenis anggaran dan jumlah sekaligus. | * **Lampiran 2: Proposal Keuangan** | 5 |
| **4.** | Alokasi anggaran antar kategori yang berbeda harus tepat, terutama alokasi antar kegiatan dan anggaran operasional. | * **Lampiran 2: Proposal Keuangan** | 5 |
| **5.** | Perkiraan biaya pemohon dan asumsi yang dibuat untuk perkiraan tersebut wajar. | * **Lampiran 2: Proposal Keuangan** | 5 |
| **Total poin proposal keuangan** | | | **30** |

1. Peta Jalan NDC Indonesia yang diperbarui: <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/Updated%20NDC%20Indonesia%202021%20-%20corrected%20version.pdf> [↑](#footnote-ref-0)
2. 29% dengan sumber dayanya sendiri dan hingga 41% dengan bantuan internasional. [↑](#footnote-ref-1)
3. Lihat detail lebih lanjut: <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia_LTS-LCCR_2021.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
4. Untuk daftar lengkap target dan indikator yang tercakup dalam program ini, silakan lihat Lampiran F [↑](#footnote-ref-3)
5. Pendekatan dalam penerapan PROKLIM berbeda-beda di tiap provinsi. Pendekatan ini dapat berupa peraturan/rencana aksi, alokasi anggaran dari Dana Desa untuk sosialisasi dan komunikasi lebih lanjut, serta untuk mendorong/memfasilitasi pengembangan PROKLIM Lestari (akreditasi PROKLIM tertinggi). [↑](#footnote-ref-4)
6. Contohnya termasuk teknik pertanian tanpa pembakaran yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan, pengelolaan berkelanjutan sumber daya kayu dan nonkayu yang bernilai ekonomis, dan sistem agroforestri yang inovatif. Selain itu, kami akan mengeksplorasi pendekatan agrosilvopastoral, peternakan rendah emisi, akuakultur, dan perikanan. Penyertaan kegiatan bernilai tambah dan kerajinan tangan juga akan ditekankan, memastikan bahwa setiap modul relevan dan praktis untuk konteks lokal. [↑](#footnote-ref-5)
7. Pendekatan dalam penerapan PROKLIM berbeda-beda di tiap provinsi. Pendekatan ini dapat berupa peraturan/rencana aksi, alokasi anggaran dari Dana Desa untuk sosialisasi dan komunikasi lebih lanjut, serta untuk mendorong/memfasilitasi pengembangan PROKLIM Lestari (akreditasi PROKLIM tertinggi). [↑](#footnote-ref-6)
8. Contohnya termasuk teknik pertanian tanpa pembakaran yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan, pengelolaan berkelanjutan sumber daya kayu dan nonkayu yang bernilai ekonomis, dan sistem agroforestri yang inovatif. Selain itu, kami akan mengeksplorasi pendekatan agrosilvopastoral, peternakan rendah emisi, akuakultur, dan perikanan. Penyertaan kegiatan bernilai tambah dan kerajinan tangan juga akan ditekankan, memastikan bahwa setiap modul relevan dan praktis untuk konteks lokal. [↑](#footnote-ref-7)
9. Penerima hibah harus mengantisipasi potensi perubahan lokasi PROKLIM yang diusulkan, yang mungkin timbul karena dinamika lapangan. Setiap perubahan harus dibenarkan dengan alasan yang sah atau mendesak, yang diketahui oleh badan lingkungan hidup setempat (DLH) kabupaten, kota, atau provinsi terkait, serta Balai PPI. Salinan justifikasi juga harus dikirimkan ke Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). [↑](#footnote-ref-8)
10. Sub-hibah terjadi ketika suatu entitas dipilih oleh mitra pelaksana untuk melaksanakan kegiatan atas nama mitra pelaksana dan mematuhi prinsip yang sama sebagaimana yang diuraikan dalam Instruksi Operasional UNOPS tentang [Dukungan Hibah](https://content.unops.org/documents/libraries/policies-2020/operational-directives-and-instructions/management-of-unops-partners-and-resulting-agreements/en/OI.IPS-Grant-Support-2.pdf) . [↑](#footnote-ref-9)
11. Kontrak dilakukan ketika mitra pelaksana mengadakan pengadaan barang, jasa, atau pekerjaan dengan menggunakan prosedur pengadaan IP. [↑](#footnote-ref-10)
12. Laporan akhir dan surat referensi dari dua proyek terbaru diperlukan.

    * Laporan Akhir: Laporan ini harus memberikan deskripsi terperinci tentang hasil yang dicapai, termasuk metrik atau data spesifik yang menunjukkan keberhasilan.
    * Surat Referensi: Surat dari mitra atau penerima manfaat terkait yang menyoroti efektivitas proyek dan peran pemohon.

    [↑](#footnote-ref-11)
13. Profil Organisasi adalah ringkasan atau ikhtisar terperinci tentang suatu organisasi, yang biasanya menyoroti informasi utama yang mendefinisikan entitas tersebut. Profil ini berfungsi sebagai pengenalan singkat tentang organisasi dan sering digunakan dalam dokumen bisnis, proposal, situs web, atau materi pemasaran. [↑](#footnote-ref-12)